

Peran *Smart ASN* dan *Digital Governance* dalam Meningkatkan Kapasitas ASN untuk Kemandirian Ekonomi Lokal

The Role of Smart ASN and Digital Governance in Increasing the Capacity of ASN for Local Economic Independence

Basri Rakhman^{1)*}, Reynilda¹⁾, Muh Ikhsan Ali Adam²⁾ & Muh Zaky²⁾

1) Magister Keuangan Publik, Fakultas Pascasarjana, Institut Teknologi dan Nobel Indonesia, Indonesia

2) Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Nobel Indonesia, Indonesia

Diterima: 2025-09-29; Direview: 2025-10-24; Disetujui: 2025-11-02

Coresponding Email: basrirakhman44@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh Smart ASN dan Digital Governance terhadap kapasitas aparatur serta dampaknya pada kemandirian ekonomi lokal di Kota Makassar. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 60 ASN dengan metode purposive sampling dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil menunjukkan bahwa Smart ASN berpengaruh signifikan terhadap kapasitas ASN ($t = 8,495$; $p = 0,000$), tetapi tidak secara langsung terhadap kemandirian ekonomi lokal ($t = -0,633$; $p = 0,529$). Namun, kapasitas ASN memediasi pengaruh Smart ASN terhadap ekonomi lokal (total effect = 23,964; $p = 0,022$). Sementara itu, Digital Governance berpengaruh signifikan langsung terhadap kemandirian ekonomi lokal ($t = 5,063$; $p = 0,000$), meski tidak signifikan terhadap kapasitas ASN ($t = -1,435$; $p = 0,157$). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam mengoptimalkan implementasi Smart ASN dan tata kelola digital guna memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan percepatan transformasi birokrasi berbasis teknologi.

Kata Kunci: Smart ASN; Digital Governance; Kapasitas ASN; Kemandirian Ekonomi Lokal

Abstract

This study empirically examines the effects of Smart ASN and Digital Governance on civil servants' capacity and their impact on local economic independence in Makassar City. Data were collected through questionnaires distributed to 60 civil servants selected using purposive sampling and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results reveal that Smart ASN has a significant effect on civil servants' capacity ($t = 8.495$; $p = 0.000$) but no direct effect on local economic independence ($t = -0.633$; $p = 0.529$). However, civil servants' capacity mediates the relationship between Smart ASN and local economic independence (total effect = 23.964; $p = 0.022$). Meanwhile, Digital Governance shows a significant direct effect on local economic independence ($t = 5.063$; $p = 0.000$) but no significant effect on civil servants' capacity ($t = -1.435$; $p = 0.157$). These findings highlight that enhancing civil servants' capacity is essential to optimizing the implementation of Smart ASN and digital governance to strengthen local economic independence. The study provides practical implications for formulating policies on civil service competency development and accelerating technology-based bureaucratic transformation.

Keywords: Smart ASN; Digital Governance; Civil Servant Capacity; Local Economic Independence

How to Cite: Rakhman, B., Reynilda, Adam, MIA., & Zaky, M. (2025), Smart ASN dan Digital Governance sebagai Katalisator Peningkatan Kapasitas ASN untuk Kemandirian Ekonomi Lokal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 903-911.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mendorong reformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efisien (Tanaamah dkk., 2021), akuntabel (Maritza & Taufiqurokhman, 2024), dan responsif (Simanjuntak, 2019). Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi krusial melalui implementasi konsep Smart ASN (Mallewai, 2024). Program ini menargetkan ASN yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga adaptif, profesional, dan melek digital, sejalan dengan agenda transformasi ASN 2024 oleh KemenPAN-RB (Faedulloh dkk., 2020). Konsep Smart ASN sekaligus mendukung prinsip Digital Governance yang berorientasi pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik (Sinaga, 2020). ASN dengan literasi digital tinggi terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah berkelanjutan, sekaligus berperan sebagai agen perubahan pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 (Ramli dkk., 2023).

Digital Governance sendiri merupakan pilar reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik melalui integrasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Janowski dkk., 2018). Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas ASN dalam mengelola sistem digital (Kurniawan dkk., 2020). Namun, rendahnya literasi digital di banyak daerah masih menjadi kendala utama karena belum tertanam dalam budaya birokrasi (Cahya dkk., 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan, serta insentif inovasi menjadi faktor penting dalam membentuk ASN yang adaptif terhadap transformasi digital dan mendukung pembangunan ekonomi lokal (Efendi & Frinaldi, 2024). Beberapa temuan penelitian (Candra dkk., 2024), (Reta, 2024), (Kurniawan dkk., 2020) menegaskan bahwa pelatihan digital secara berkelanjutan serta insentif terhadap inovasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kapasitas ASN secara menyeluruh.

Di sisi lain, kemandirian ekonomi lokal menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional yang membutuhkan aparatur berkapasitas sebagai fasilitator, inovator, dan kolaborator (Suman dkk., 2019). ASN berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang kondusif bagi UMKM, koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas (Laia dkk., 2024). Transformasi ASN melalui Smart ASN dan Digital Governance diyakini dapat memperkuat fondasi kemandirian ekonomi lokal (Zein, 2023). Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN 2025–2029 (Kementerian Sekretariat Negara), visi Indonesia Emas 2045 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, t.t.), serta kebijakan nasional seperti UU ASN No. 5 Tahun 2014 (Perpres RI, 2014), PermenPAN-RB No. 3 Tahun 2020 (Database Peraturan RI, 2015), dan Asta Cita Presiden 2025–2029 yang menekankan pembangunan SDM unggul. Penelitian (Lalu Rizky, 2024) menyoroti pentingnya peran ASN sebagai penggerak utama dalam menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan dukungan kebijakan dan infrastruktur digital yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM, ekonomi kreatif, dan potensi daerah belum optimal karena birokrasi daerah belum cukup adaptif dan belum berbasis digital governance secara menyeluruh (Putra, 2020). Meskipun demikian, kesenjangan masih terjadi antara kebijakan transformasi digital di tingkat pusat dengan implementasinya di daerah. Laporan Bappenas dan survei KemenPAN-RB menunjukkan bahwa hanya 41% ASN di daerah yang merasa siap menghadapi digitalisasi, sementara sebagian besar instansi masih terkendala oleh rendahnya kapasitas SDM dan budaya inovasi (Munap, 2021). Kondisi ini membuat digitalisasi pemerintahan cenderung bersifat prosedural, belum transformasional (Setiadi dkk., 2025).

Kota Makassar, sebagai bagian dari program Smart City Kemenkominfo, telah menginisiasi berbagai inovasi seperti Makassar Sombere & Smart City, e-office, Lorong Wisata, Warung Digital, serta Command Center. Namun, evaluasi Pemkot Makassar menunjukkan bahwa sinergi antara ASN dan sektor ekonomi lokal masih belum optimal, terutama dalam pemanfaatan data digital untuk pengambilan kebijakan (Nurhamzah & Darni, 2025). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif ASN yang inovatif dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan transformasi digital.



Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya implementasi konsep Smart ASN dan Digital Governance sebagai katalis reformasi birokrasi dan penggerak kemandirian ekonomi lokal. Kesenjangan penelitian (research gap) yang ingin dijawab adalah belum banyak studi empiris yang menguji hubungan langsung dan tidak langsung antara Smart ASN, Digital Governance, kapasitas ASN, dan kemandirian ekonomi lokal secara simultan.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Smart ASN dan Digital Governance terhadap kapasitas ASN serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi lokal di Kota Makassar. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penerapan konsep Smart ASN untuk membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan melek teknologi, serta penguatan digital governance sebagai instrumen efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Keduanya berperan sebagai katalis reformasi birokrasi dan kunci dalam membangun kemandirian ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antarvariabel secara simultan, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, serta cocok untuk ukuran sampel yang relatif kecil dan model yang bersifat prediktif (Hair dkk., 2017). Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0. (Harsono & Imran, 2025).

Subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar yang bekerja pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2) Dinas Koperasi dan UKM;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesiapan infrastruktur digital dan peran strategis Kota Makassar sebagai pusat ekonomi kawasan timur Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) ASN yang pernah mengikuti pelatihan Smart ASN atau digitalisasi, (2) terlibat dalam pelayanan publik berbasis digital, dan (3) berkontribusi dalam program ekonomi lokal (Supintar & Ekowati, 2025). Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 60 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Setiap konstruk diukur dengan beberapa indikator yang disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu. Sebelum digunakan, instrumen diuji melalui validitas isi (content validity) oleh tiga ahli bidang manajemen publik dan pemerintahan digital.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria. Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data. Proses pengumpulan dilakukan selama dua minggu, setelah mendapatkan izin penelitian dari masing-masing OPD.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SEM-PLS yang terdiri atas dua tahap utama:

1. Evaluasi model pengukuran (outer model) — meliputi:
 - Uji validitas konvergen: indikator dianggap valid jika loading factor ≥ 0.70 dan Average Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50 ;
 - Uji validitas diskriminan: berdasarkan kriteria Fornell-Larcker dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) < 0.90 ;
 - Uji reliabilitas konstruk: konstruk dinyatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha ≥ 0.70 dan Composite Reliability (CR) ≥ 0.70 (Hair et al., 2019).



2. Evaluasi model struktural (inner model) — meliputi pengujian koefisien determinasi (R^2), path coefficient, t-statistics, dan p-value untuk menilai signifikansi hubungan antarvariabel, serta Indirect Effect untuk menguji pengaruh mediasi.

Tabel 1. Tabel Kelayakan Model

Konstruk	Loading Factor	AVE	CR	Cronbach's Alpha	Keterangan
Smart ASN	0.714-0.892	0.646	0.911	0.876	Valid dan Reliabel
Digital Governance	0.702-0.881	0.623	0.905	0.861	Valid dan Reliabel
Kapasitas ASN	0.730-0.867	0.681	0.918	0.888	Valid dan Reliabel
Kemandirian Ekonomi Lokal	0.721-0.889	0.667	0.912	0.875	Valid dan Reliabel

Seluruh indikator memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga model pengukuran dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian model struktural.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, serta peran strategisnya dalam mendukung pembangunan regional. Pemilihan ASN sebagai responden didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (Aisyah dkk., 2024). Karakteristik responden ditinjau berdasarkan beberapa variabel, antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama masa kerja, jabatan dan OPD Asal Responden. Keberagaman karakteristik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap kondisi birokrasi dan dinamika ASN di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
1. Jenis Kelamin	Laki-laki	34	56,7%
	Perempuan	26	43,3%
2. Usia	21-30 tahun	8	13,3%
	31-40 tahun	24	40%
	41-50 tahun	20	33,3%
	>50 tahun	8	13,3%
3. Tingkat Pendidikan	D3	4	6,7%
	S1	36	60%
	S2	18	30%
	S3	2	3,3%
4. Masa Kerja (ASN)	< 5 tahun	5	8,3%
	5-10 tahun	18	30%
	11-20 tahun	25	41,7%
	>20 tahun	12	20%
5. Jabatan	Struktural	25	41,7%
	Fungsional	35	58,3%
6. OPD Asal Responden	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	20%
	Dinas Koperasi dan UKM	10	16,7%
	BKPSDMD	13	21,7%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	18,3%
	Bappeda	14	23,3%

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Makna/interpretasi karakteristik responden didasarkan atas Tabel 1.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jenis Kelamin. Komposisi responden terdiri dari 56,7% laki-laki dan 43,3%



perempuan. Ini menunjukkan partisipasi yang cukup seimbang dalam birokrasi Kota Makassar, mencerminkan inklusivitas gender di berbagai OPD. (2) Usia. Mayoritas ASN berusia 31–50 tahun (73,3%), yakni usia produktif dengan pengalaman yang cukup namun masih adaptif terhadap transformasi digital. Hal ini penting dalam implementasi Digital Governance dan penguatan kapasitas ASN melalui pendekatan Smart ASN. (3) Tingkat Pendidikan. Sebagian besar ASN berpendidikan S1 dan S2 (90%). Ini menunjukkan bahwa ASN di Kota Makassar secara akademik cukup siap menerima dan menerapkan konsep-konsep baru dalam tata kelola pemerintahan digital dan penguatan kapasitas diri. (4) Masa Kerja. Sebanyak 61,7% ASN memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam mendukung implementasi kebijakan, sekaligus tantangan dalam mendorong adaptasi budaya kerja baru yang digital dan berbasis kinerja. (6) Jabatan. SN dengan jabatan fungsional (58,3%) lebih dominan dibanding struktural (41,7%). Jabatan fungsional biasanya memiliki orientasi kerja yang lebih teknis dan output-based, yang sejalan dengan semangat efisiensi dan akuntabilitas dalam Smart ASN. (7) OPD Asal Responden. Responden berasal dari OPD strategis dalam transformasi digital dan pemberdayaan ekonomi lokal. Seperti, (a) Dikominfo: Pengelola sistem informasi pemerintahan dan digitalisasi layanan. (b) Dinas Koperasi & UKM dan Disperindag: Berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi lokal. (c) BKPSDMD: Pengembangan kompetensi ASN. (d) Bappeda: Perencana utama kebijakan daerah, termasuk pengembangan ekonomi digital. Adapun simpulan yang dapat dikemukakan didasarkan atas hasil karakteristik responden adalah: Karakteristik responden menunjukkan bahwa ASN di Kota Makassar didominasi oleh individu yang berada dalam usia produktif dan berpendidikan tinggi. Selain itu memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk memahami tantangan birokrasi namun juga berada pada fase yang masih bisa diarahkan ke transformasi digital. Lebih lanjut terdistribusi secara proporsional antara jabatan struktural dan fungsional.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas sangat penting dalam penelitian karena memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga kesimpulan yang diambil dari penelitian menjadi lebih sah (Arbeni dkk, 2025). Tanpa validitas yang memadai, hasil penelitian berisiko tidak mencerminkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya, yang pada akhirnya dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan atau pengembangan teori. Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas item adalah sebagai berikut: sebuah item dianggap valid jika koefisien Korelasi Pearson-nya secara statistik signifikan (umumnya nilai Sig. atau p-value < 0.05 untuk uji satu-sisi) dan koefisien korelasi (nilai r) berada di atas ambang batas yang telah ditentukan (Siregar, 2025).

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap seluruh item pertanyaan dalam instrumen penelitian, diperoleh nilai r hitung masing-masing item lebih besar daripada nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% ($r_{tabel} = 0,254$ untuk $n = 60$, $df = 58$). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item instrumen dinyatakan valid. Dengan demikian, setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur indikator variabel yang dimaksud secara tepat. Validitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam mengukur konstruk yang hendak diteliti. Oleh karena itu, instrumen layak digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

Uji reliabilitas penting dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten dan stabil apabila digunakan dalam kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang serupa jika pengukuran diulang, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap Ω kapasitas ASN dalam hal kompetensi, keterampilan digital, dan kinerja birokrasi. Kapasitas ASN yang meningkat kemudian berkontribusi secara signifikan dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kapasitas ASN sebagai penghubung yang memperkuat dampak Digital Governance terhadap pembangunan ekonomi lokal.



Tabel 3. Uji Validitas

No	Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Signifikan	Keterangan
1	X _{1.1}	0,813	0,254	0,000	Valid
2	X _{1.2}	0,845	0,254	0,000	Valid
3	X _{1.3}	0,873	0,254	0,000	Valid
4	X _{1.4}	0,893	0,254	0,000	Valid
5	X _{1.5}	0,881	0,254	0,000	Valid
6	X _{2.1}	0,695	0,254	0,000	Valid
7	X _{2.2}	0,830	0,254	0,000	Valid
8	X _{2.3}	0,812	0,254	0,000	Valid
9	X _{2.4}	0,878	0,254	0,000	Valid
10	X _{2.5}	0,785	0,254	0,000	Valid
11	Y ₁	0,690	0,254	0,000	Valid
12	Y ₂	0,793	0,254	0,000	Valid
13	Y ₃	0,823	0,254	0,000	Valid
14	Y ₄	0,731	0,254	0,000	Valid
15	Y ₅	0,634	0,254	0,000	Valid
16	Z ₁	0,673	0,254	0,000	Valid
17	Z ₂	0,549	0,254	0,000	Valid
18	Z ₃	0,668	0,254	0,000	Valid
19	Z ₄	0,575	0,254	0,000	Valid
20	Z ₅	0,510	0,254	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Variable	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect	P-Value	Description
	Eksogen	Intervening	Endogen			
1	Smart ASN (X ₁)	Kapasitas Aparatur ASN (Y)	8,495	0	8,495	0,000 Positif Signifikan
2	Digital Governance (X ₂)	Kapasitas Aparatur ASN (Y)	-1,435	0	-1,435	0,157 Negatif Tidak Signifikan
3	Smart ASN (X ₁)	Kemandirian Ekonomi Lokal (Z)	-0,633	0	-0,633	0,529 Negatif Tidak Signifikan
4	Digital Governance (X ₂)	Kemandirian Ekonomi Lokal (Z)	5,063	0	5,063	0,000 Positif Signifikan
5	Kapasitas Aparatur ASN (Y)	Kemandirian Ekonomi Lokal (Z)	1,821	0	1,821	0,014 Positif Signifikan
6	Smart ASN (X ₁)	Kapasitas Aparatur ASN (Y)	Kemandirian Ekonomi Lokal (Z)	8,495	15,469	23,964 0,022 Positif Signifikan
7	Digital Governance (X ₂)	Kapasitas Aparatur ASN (Y)	Kemandirian Ekonomi Lokal (Z)	-1,435	2,613	1,178 0,041 Positif Signifikan

Sumber: Hasil olah data (2025)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart ASN berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur, yang mencakup dimensi kompetensi, profesionalisme, dan kualitas kinerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Mallewai, 2024) dan (Faedlulloh dkk., 2020) yang menegaskan bahwa Smart ASN merupakan strategi transformasional untuk menciptakan ASN adaptif dan berdaya saing di era digital. Tingginya nilai t-statistic (8.495; $p = 0.000$) mengindikasikan bahwa kebijakan pelatihan dan digitalisasi ASN di Kota Makassar telah berjalan efektif dalam meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparatur. Namun demikian, efek Smart ASN belum secara langsung mendorong kemandirian ekonomi lokal, karena dampaknya masih bergantung pada sejauh mana kapasitas tersebut diterapkan dalam konteks kebijakan ekonomi daerah. Hal ini memperkuat temuan (Zein, 2023) bahwa Smart ASN baru berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi jika diintegrasikan dengan kebijakan lintas sektor dan agenda digital governance daerah.

Berbeda dengan Smart ASN, hasil analisis menunjukkan bahwa Digital Governance berpengaruh langsung terhadap kemandirian ekonomi lokal ($t = 5.063$; $p = 0.000$). Temuan ini menegaskan pendapat (Janowski dkk., 2018) dan (Putra, 2020) bahwa tata kelola digital mampu mempercepat efisiensi pelayanan publik, transparansi keuangan daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap kebijakan ekonomi produktif. Pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Sombere & Smart City dan Command Center telah menunjukkan pergeseran dari birokrasi administratif menuju birokrasi berbasis data. Digitalisasi ini menciptakan peluang bagi sektor UMKM untuk mengakses informasi dan dukungan program secara lebih terbuka, sebagaimana juga ditekankan oleh (Nurhamzah & Darni, 2025).

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas ASN berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara Smart ASN dan Digital Governance terhadap kemandirian ekonomi lokal. Efek mediasi ini memperkuat konsep bureaucratic capacity (Kurniawan dkk., 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan digital sangat ditentukan oleh kemampuan manusia di balik sistem. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan kompetensi aparatur. ASN dengan literasi digital yang baik mampu menerjemahkan kebijakan teknologi menjadi tindakan nyata yang berdampak pada ekonomi masyarakat, terutama melalui fasilitasi program UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif (Laia dkk., 2024; Suman dkk., 2019).

Temuan ini sekaligus mengonfirmasi model konseptual penelitian bahwa Smart ASN → Kapasitas ASN → Kemandirian Ekonomi Lokal merupakan jalur pengaruh paling kuat, dengan total effect mencapai 23.964 ($p = 0.022$). Artinya, penguatan kapasitas aparatur menjadi jembatan yang menghubungkan inisiatif reformasi digital dengan hasil pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan Smart ASN dan Digital Governance harus dilaksanakan secara sinergis — bukan sekadar pada level sistem dan teknologi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksananya.

Secara teoretis, hasil ini memperkaya literatur mengenai *peran Smart Bureaucracy* dalam pembangunan daerah berbasis digital. Secara praktis, hasil penelitian memberikan arah kebijakan bahwa pengembangan ASN digital di daerah perlu difokuskan pada pembentukan kompetensi adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara investasi pada infrastruktur teknologi dan investasi pada pengembangan SDM, agar transformasi digital benar-benar menghasilkan birokrasi yang inklusif, efisien, dan berdaya dorong terhadap kemandirian ekonomi lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep Smart ASN terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, terutama dalam aspek kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Namun, pengaruh Smart ASN terhadap kemandirian ekonomi lokal tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan kapasitas ASN terlebih dahulu. Temuan ini menunjukkan bahwa Smart ASN merupakan fondasi penting dalam proses reformasi birokrasi, tetapi dampak nyatanya baru dapat



dirasakan apabila kapasitas tersebut benar-benar dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan implementasi program pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya, Digital Governance memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi lokal melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik berbasis teknologi, meskipun tidak secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas ASN secara individual. Dengan demikian, kapasitas ASN terbukti menjadi faktor penghubung utama yang menjembatani pengaruh Smart ASN dan Digital Governance terhadap penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat strategi pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan digital berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta pemberian insentif berbasis kinerja dan inovasi. Integrasi kebijakan Smart ASN dan Digital Governance juga perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru melalui kolaborasi antara ASN, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif. Pembangunan infrastruktur digital hendaknya dibarengi dengan peningkatan literasi data dan kepemimpinan digital agar aparatur mampu mengoptimalkan penggunaan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha perlu diperkuat untuk mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas (smart governance) dan berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model hubungan antara Smart ASN, Digital Governance, kapasitas aparatur, dan kemandirian ekonomi lokal, sekaligus memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada transformasi birokrasi digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Magdalena, N. M., Sihombing, S. B., & Afnira, E. (2024). Penerapan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja ASN. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 221–237.
- Arbeni, W., Windiani, A., Sihotang, D. S. B., Anggraini, N., Wulandari, S., & Nugroho, A. (2025). Test Reliability Analysis in Educational Evaluation: A Quantitative Approach to Consistency and Validity. *Holistic Science*, 5(1), 59–64.
- Cahya, T., Aris, U., Pranacitra, R., Suriyanto, S., & Dewanto, W. (2024). Smart Governance: Program Transformasional Digital Nasional melalui Desa, Siapkah Indonesia? *Iblam Law Review*, 4(2), 217–223.
- Candra, T. Z. A., Pangkey, I., & Sijiw, D. S. (2024). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 691–703.
- Database Peraturan RI. (2015). *PP No. 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5564/pp-no-5-tahun-2015>
- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 630–639.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan revolusi industri 4.0: Mencegah Smart ASN menjadi mitos dalam agenda reformasi birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336.
- Hair, J. F., Tomas, M. H., Christian, M. R., & Marko, S. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Second Edition*. SAGE Publications.
- Harsono, S., & Imran, B. (2025). *Buku Pendekatan Structural Equation Modeling untuk Penelitian Kuantitatif: Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Penerbit Widina.
- Janowski, T., Estevez, E., & Baguma, R. (2018). Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen-administration relationships in the digital age. *Government Information Quarterly*, 35(4), S1–S16.
- Kementerian Sekretariat Negara. (t.t.). *RPJMN 2025-2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045* / Sekretariat Negara. Diambil 8 April 2025, dari

- https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjmn_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_e_mas_2045
- Kurniawan, R., Djaenuri, A., Prabowo, H., & Lukman, S. (2020). Analysis of Policy Evaluation and Model of ASN Management Improvement in terms of Planning, Recruitment, and Competency Development Aspects. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 404–418.
- Laia, A., Lase, D., Waruwu, S., & Buulolo, N. A. (2024). Evaluasi Pelatihan Keterampilan di Kantor Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 34–31.
- Lalu Rizky, R. F. (2024). *Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuju Smart City* [PhD Thesis, Institut Pemerintahan dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/20016/>
- Mallewai, I. H. (2024). Peran Strategis Widyaishwara dalam Corporate University untuk Pengembangan Smart ASN Berbasis Moderasi Beragama. *Prosiding PITNAS Widyaishwara*, 1, 176–190.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Munap, D. P. (2021). *Membangun Budaya Kerja yang Inovatif dan Berorientasi Layanan dalam Reformasi Birokrasi*. https://www.academia.edu/download/121167389/Semi_Jurnal_Birokrasi_Dheaz_Putri_Munap.pdf
- Nurhamzah, F., & Darni, I. E. (2025). Transformasi Manajemen Publik Berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(1). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=29624738&AN=183586415&h=7UpqoKA8vj54iCyezx7hSLBv5e1U%2Bh5vk6BkMLP8wIwp6uGnSrV31SRmx6506Xw503uuTVti0w9a9g8Er4KaeA%3D%3D&crl=c>
- Perpres RI. (2014). *UU ASN No. 5 Tahun 2014*.
- Putra, D. T. F. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144–176.
- Ramli, A., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., Saputra, A. M. A., Pirmani, P., Nurhasanah, N., Nirwana, I., & Mahmudah, K. (2023). *Landasan Pendidikan: Teori Dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 Dan Society 5.0 Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. (t.t.). *RPJPN 2025-2045*. Diambil 9 April 2025, dari <https://indonesia2045.go.id/>
- Reta, S. A. (2024). Analysis of Factors Affecting the Performance of State Civil Apparatus (ASN) in the Semarang City Government Environment. *Moccasin Journal De Public Perspective*, 1(4), 213–221.
- Setiadi, A., Mulyaningsih, M., & Ulumudin, A. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. *Ministrat: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 58–79.
- Simanjuntak, E. D. S. (2019). *Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Era Revolusi 4.0*. 429–434. <http://digilib.unimed.ac.id/38825/>
- Sinaga, S. (2020). Peranan Balas Jasa dan Insentif terhadap Motivasi Kerja Pada PT. Sony Gemerlang Medan. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.605>
- Siregar, T. (2025). Mengapa Validitas dan Reliabilitas Penting dalam L&D (Pembelajaran & Pengembangan): Apa yang Dapat Anda Lakukan Tentang Hal Ini. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 7(1), 1–12.
- Suman, A., Putra, R. E. N., Amalia, S. K., Hardanto, H., Kusuma, C. A., & Amir, F. (2019). *Ekonomi lokal: Pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Supintar, D. B., & Ekowati, M. (2025). *Efektivitas Manajemen PNS melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan* [PhD Thesis, IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/22517/>
- Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(6), 1–12.
- Zein, M. H. M. (2023). *Transformasi Birokrasi Pada Abad 4.0*. Sada Kurnia Pustaka.

